

EVALUASI STERILISASI FASILITAS DARAT PELABUHAN PENYEBERANGAN SAPE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Yudi Setiawan

*Program Studi Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta,
yudisetiawan@gmail.com*

Abstrak

Pelabuhan Sape merupakan pelabuhan yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape. Pada saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Sape masih terdapat beberapa kekurangan dikarenakan masih banyaknya orang maupun kendaraan yang tidak berkepentingan dapat dengan mudah masuk ke wilayah pelabuhan sehingga menyebabkan pelabuhan menjadi kurang teratur, masih terjadinya pertemuan (crossing) antara kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal dengan kendaraan yang keluar dari kapal, dan pedagang asongan yang menjajakan jualannya di area sekitar Dermaga. Hal ini disebabkan belum adanya penerapan sistem zonasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. Sehingga dalam kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat kendaraan terdapat beberapa kendala antara lain, belum adanya penerapan zonasi di pelabuhan yang menyebabkan orang yang tidak berkepentingan masuk ke area yang terlarang, dan bercampurnya penumpang dan kendaraan pada saat naik atau turun dari kapal. Untuk menganalisa hal tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Analisa yang digunakan ialah analisa penentuan zona, analisa perlengkapan yang mendukung sistem zona, dan analisa pola arus kendaraan

Di Pelabuhan Penyeberangan Sape nyatanya masih terdapat fasilitas pokok lahan daratan yang masih kurang hingga tidak ada sehingga dapat menghambat kegiatan operasional pelabuhan. Berdasarkan hasil analisa, maka dapat diketahui bahwa Pelabuhan Penyeberangan Sape belum menyediakan ruang tunggu yang memiliki luas dan kursi ruang tunggu yang memadai sehingga banyak penumpang yang duduk dilantai ketika menunggu kapal yang tripnya hanya sekali sehari. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan serta penambahan pada beberapa fasilitas yang kurang hingga bahkan tidak ada pada pelabuhan Sape hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Sape. Dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan pengaturan pola arus lalu lintas sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan serta menambahkan perlengkapan yang mendukung system zona seperti rambu yang dibutuhkan dalam mendukung keamanan dan kenyamanan

Kata kunci : evaluasi, sterilisasi, fasilitas, Pelabuhan, penyeberangan,

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana di kabupaten ini terdapat salah satu kecamatan yang paling rendah letaknya dari permukaan laut yaitu Kecamatan Sape. Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin, transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi antar wilayah dan sangat penting

perannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah, transportasi memiliki contoh berupa angkutan penyeberangan.

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Oleh karena itu keberadaan angkutan penyeberangan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengguna jasa agar dalam pelayanannya pengguna jasa terlayani dengan

baik. Terdapat banyak pelabuhan angkutan penyeberangan di Indonesia yang melayani berbagai lintasan komersil maupun lintasan perintis, salah satu dari pelabuhan penyeberangan tersebut adalah Pelabuhan Penyeberangan Sape yang berada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan Penyeberangan Sape merupakan salah satu pelabuhan penyeberangan komersil yang di kelola oleh PT. ASDP Cabang Sape yang terletak di Kabupaten Bima yang berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pelabuhan Sape melayani 2 lintasan, yaitu Sape – Labuan Bajo, dan Sape – Waingapu.

Pelabuhan ini menunjang pengangkutan hasil – hasil pertanian, kebutuhan bahan bangunan, industri, pariwisata, serta menciptakan lalu lintas angkutan penumpang, barang dan kendaraan. Pelabuhan Sape melayani lintasan komersil yang didukung dengan 3 (tiga) kapal yaitu KMP. Cakalang untuk lintasan Sape – Labuan Bajo, KMP. Cucut untuk lintasan Sape – Waingapu, KMP. Komodo untuk lintasan pariwisata di Labuan Bajo. Pada kondisi saat ini Pelabuhan Sape masih belum berfungsi secara optimal karena masih belum diterapkan sistem zonasi pada pelabuhan seperti masih ada pedagang memasuki area dermaga, pengantar dan/atau penjemput memasuki lapangan siap muat, penumpang menunggu keberangkatan kapal diatas dermaga *Movable Bridge* serta bercampurnya penumpang dan kendaraan, dan terjadinya pertemuan (*crossing*) antara kendaraan masuk dan kendaraan keluar yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas di Pelabuhan. Sementara saat ini pihak pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait dengan sistem zonasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, maka setiap pelabuhan penyeberangan dituntut agar lebih memperhatikan pembagian zona wilayah, tata letak, dan pengaturan lalu lintas yang ada di pelabuhan penyeberangan baik itu penumpang, maupun kendaraan. Keteraturan dan Kelancaran pergerakan muatan yang ada

pada suatu pelabuhan menunjukkan keberhasilan kinerja suatu pelabuhan dalam mengatur dan mengolah operasional pelabuhan untuk menjadi lebih baik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. METODOLOGI

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi yaitu jenis penelitian dengan melakukan kajian terhadap penilaian suatu hasil atau penyelesaian masalah. Penelitian evaluasi mempertimbangkan keuntungan suatu program, proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Pengambilan kesimpulan penelitian didasarkan atas tolok ukur dan kriteria tertentu misalnya sasaran yang hendak dicapai melalui program yang dilaksanakan. Tolok ukur untuk komponen-komponen program adalah kualitas maksimal yang dikehendaki bagi setiap komponen.

2.2. Metodologi Penelitian

2.2.1. Metode Analisis Data

Yaitu kegiatan mengolah data, dari data yang sudah diperoleh, melakukan kajian dengan teori dan data-data yang diperoleh. Analisis Data juga dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

a. Analisa Sistem Zonasi Pelabuhan

Sterilisasi pelabuhan Penyeberangan Sape dapat diterapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 29 Tahun 2016 tentang sterilisasi pelabuhan. Berikut ini adalah pembagian zona menurut peraturan :

- Zonasi A untuk Orang
Zonasi A sebagaimana dimaksud meliputi:
 - Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya di peruntukan bagi pengantar/penjemput penumpang

- (dari Pintu Gerbang pelabuhan sampai loket)
- Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya diperuntukan bagi calon penumpang.
 - Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya di peruntukan bagi orang yang akan menyeberang.
- b. Zonasi B untuk Kendaraan
Zonasi B sebagaimana dimaksud meliputi:
- Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan *toll gate* bagi kendaraan
 - Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket)
 - Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk ke kapal
- c. Zonasi C untuk Fasilitas Vital.
Zona C sebagaimana dimaksud merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain:
- Bunker
 - Rumah MB (*Moveable bridge*) dan *Gangway*
 - Hidran air
 - Gardu Listrik/ Genset
 - Tempat Bolder

2.2.2. Metode Pembahasan Hasil Analisis

Setelah didapatkan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah menentukan cara menyelesaikan masalah yang ada di bawah ini sesuai dengan kondisi yang ada yaitu:

- 1) Melakukan perhitungan terhadap masing-masing zona guna memenuhi standar yang telah diterapkan peraturan sehingga kinerja pelabuhan semakin optimal dalam memberikan pelayanan ke pengguna jasa.

- 2) Pengoptimalan penerapan zona di pelabuhan berupa pola pengaturan arus penumpang di pelabuhan Sape yang membagi antara zona non penumpang, zona calon penumpang dan zona penumpang sehingga masing-masing zona dapat berfungsi secara optimal dan teratur. Sedangkan penerapan zonasi terhadap kendaraan harus dilakukan agar lalu lintas di pelabuhan dapat berjalan lancar. Selain itu penerapan zonasi yang dilakukan harus membuat area pelabuhan steril dari orang atau kendaraan yang tidak berkepentingan dan penumpang tidak ikut menunggu di dalam kendaraan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Data Penelitian

3.1.1. Produktivitas Kapal

Angkutan penyeberangan di kabupaten Bima memiliki peranan yang penting bagi kelancaran kegiatan transportasi masyarakat Bima dan sekitarnya, Pelabuhan Penyeberangan yang terdapat di Kabupaten Bima adalah Pelabuhan Penyeberangan Sape yang menjadi tujuan utama masyarakat untuk menyeberang ke Labuan Bajo dan Waingapu. Banyaknya pengguna jasa yang menyeberang menjadi tolok ukur dalam kemajuan atas pengembangan operasional di Pelabuhan, Pelabuhan yang memiliki dua kapal ini mampu melayani kegiatan penyeberangan tersebut.

Lintasan komersil kapal yang beroperasi pada Pelabuhan Penyeberangan Sape yaitu lintas Sape – Labuan Bajo dan Sape – Waingapu dengan armada yang beroperasi yaitu KMP Cakalang dan KMP Cucut serta 1 kapal tambahan untuk lintasan pariwisata ke pulau – pulau di sekitar Labuan Bajo yaitu KMP Komodo.

Berikut data produktivitas kapal di pelabuhan penyeberangan Sape dengan lintas Sape – Labuan Bajo diperoleh hasil survei selama 15 (lima belas hari) hari di bulan September 2021 :

Tabel 3.1 Produktivitas Kapal

No	Tanggal	Tipe	Perjalanan		Rendahnya per golongan													Total	
			Kembali	Kejawa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	12 Sept 2021	2	1	78	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
2	13 Sept 2021	2	3	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
3	14 Sept 2021	2	20	1	22	2	32	15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
4	15 Sept 2021	2	10	10	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
5	17 Sept 2021	2	1	78	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
6	18 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
7	19 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107
8	20 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
9	21 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
10	22 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
11	23 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
12	24 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
13	27 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
14	28 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
15	31 Sept 2021	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80

Sumber: data sekunder

Berdasarkan data diatas, pada tanggal 29 September 2021 adalah lintasan Sape – Labuan Bajo dengan hasil produksi 250. Sedangkan pada tanggal lainnya produktivitas kapal dilakukan sesuai jadwal.

3.1.2. Produktivitas Tahunan

Berikut data produktivitas tahunan untuk operasi komersil di pelabuhan Sape – Labuan Bajo selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.2 Produktivitas Tahunan

Sumber : Hasil Survei, 2021

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Trip	1.635	1.573	962	858	818
Dewasa	79.247	92.213	83.291	72.408	63.487
Anak-anak	5.963	5.237	4.228	4.056	5.143
Sub Jumlah	85.210	97.450	87.519	76.467	68.630
Golongan I	56	67	72	58	71
Golongan II	12.004	15.036	12.580	10.815	9.768
Golongan III	213	198	183	155	238
Golongan IV A	3.237	3.574	3.193	3.079	3.065
Golongan IV B	3.000	3.129	3.048	2.804	2.924
Golongan V A	24	41	19	33	27
Golongan V B	9.239	8.739	6.834	5.615	5.772
Golongan VI A	-	-	-	-	5
Golongan VI B	5.837	4.087	2.219	1.452	1.400
Golongan VII	80	72	103	276	239
Golongan VIII	14	30	4	51	15
Golongan IX	7	2	26	31	28
Jumlah	33.711	34.975	28.281	24.369	23.552

Sumber: hasil survei

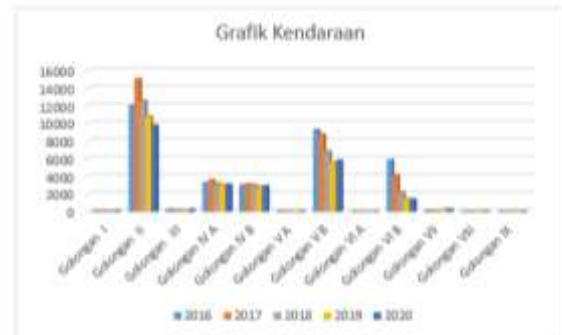
Sesuai dengan data produktivitas penumpang dan kendaraan pelabuhan penyeberangan Sape periode 2017 - 2021 akan terlihat pada grafik berikut:



Gambar 3.1 Grafik Data Produktivitas Penumpang

Sumber : Hasil Survei, 2021

Berdasarkan grafik data berikut, untuk setiap tahun mengalami peningkatan namun pada tahun 2021 terjadi penurunan disebabkan karena keadaan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.



Gambar 3.2 Grafik Data Produktivitas Kendaraan

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Sedangkan grafik data kendaraan untuk setiap tahun mengalami peningkatan namun pada tahun 2021 terjadi penurunan juga, karena disebabkan oleh keadaan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sehingga mengalami penurunan.

3.2. Analisis

3.2.1. Analisis Kondisi Eksisting

a. Sistem Zonasi Eksisting

Saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Sape belum menerapkan sistem zonasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. Pada kondisi eksisting di Pelabuhan Penyeberangan Sape masih terjadi crossing

yaitu kendaraan yang keluar dari kapal dengan kendaraan yang akan masuk maupun antara kendaraan pengantar jemput dan penumpang, keadaan loket penumpang yang digabung dengan loket kendaraan, keberadaan pedagang asongan di area pelabuhan yang bukan pada tempatnya seperti di area rumah Movable Bridge. Hal tersebut menyebabkan Pelabuhan Penyeberangan Sape menjadi tidak teratur serta dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional di Pelabuhan.



Gambar 3.3 Loket Penumpang yang bergabung dengan Loket Kendaraan
Sumber: hasil survei



Gambar 3.4 Pedagang Asongan yang berada di Area Rumah MB
Sumber: hasil survei

Keberadaan pedagang asongan di area pelabuhan yang bukan pada tempatnya seperti di area menuju ke dermaga, tempat pemeriksaan tiket dan di *movable bridge*

dapat mengganggu, kegiatan bongkar muat kendaraan dari dan ke kapal.



Gambar 3.5 Ruang Tunggu Penumpang
Sumber: hasil survei

3.3. Pembahasan Hasil Analisis

3.3.1. Pemilihan Sistem yang Direkomendasikan

1. Zona A untuk penumpang

Dari hasil analisis penentuan zona A1 yaitu kondisi eksisting lapangan parkir pengantar/penjemput Pelabuhan Penyeberangan Sape masih memenuhi dari hasil analisis. Sedangkan, kondisi eksisting lapangan parkir tidak di pakai untuk tempat parkir namun hanya untuk mengantar atau menjemput penumpang.

Selanjutnya zona A2 yaitu kondisi eksisting ruang tunggu penumpang dengan luas 82,2 m² belum memenuhi dari hasil analisis, masih perlu dilakukan penambahan tempat duduk dengan jumlah paling sedikit 71 kursi sehingga penumpang tidak keluar dan menunggu pada tempat yang bukan zona penumpang yaitu di area dermaga.

Zona A3 yaitu jalan penumpang yang akan masuk ke kapal serta sebagai tempat untuk pemeriksaan tiket penumpang yang akan masuk ke kapal.

2. Zona B untuk kendaraan

Hasil analisis zona B1 yaitu area penempatan jembatan timbang dan *toll gate* bagi kendaraan. Di pelabuhan

penyeberangan Sape masih dalam 1 lokasi yaitu di gedung terminal, sedangkan untuk jembatan timbang ada dengan kapasitas 15 ton.

Zona B2 kondisi eksisting antrian kendaraan untuk menuju ke tempat parkir siap muat dan telah memiliki tiket.

Zona B3 yaitu Zona ini merupakan area muat kendaraan siap masuk kapal. Bagi kendaraan yang membawa penumpang harus turun di area penumpang zona A1. Sedangkan parkir kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) ditempatkan pada area yang berbeda..

3. Zona C untuk fasilitas vital

Zona ini berfungsi untuk kemandirian dan keselamatan area pelabuhan dan tidak diizinkan masuk selain petugas, seperti contoh *bunker*, rumah *movable bridge*, hidran air, gardu listrik dan tempat *border*.

3.3.2. Perbandingan antara Sistem yang Ada dengan Sistem yang Direkomendasikan

Berikut Perbandingan dan Manfaat antara Sistem yang Ada dengan Kondisi yang Direncanakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Kondisi Saat ini dan Kondisi Direncanakan

No.	Kondisi Saat ini	Kondisi Yang Direkomendasikan
1.	Kondisi Gedung Terminal hanya terdiri dengan ruang tunggu penumpang yang dengan jumlah kursi penumpang dalam ruang tunggu hanya cukup untuk 20 orang sehingga hal tersebut mengurangi fungsi dan ruang tunggu tersebut sebagai tempat menunggu penumpang sebelum naik ke kapal. Gedung Terminal tidak dimanfaatkan secara optimal. Luasan Ruang tunggu: 42 m ² (Ruang Tunggu) Jumlah Kapasitas Kursi Penumpang: 20 Orang	Adanya penambahan luas ruang tunggu yang kondisi eksistingnya yaitu 42m ² menjadi 109 m ² untuk kebutuhan operasional dan adanya penambahan kursi ruang tunggu penumpang yaitu dari kondisi eksisting yang hanya memiliki kursi sebanyak 20 unit kursi menjadi 91 unit kursi agar setiap penumpang dapat mendapatkan kenyamanan, untuk rencana yang dibuat penulis yaitu rencana untuk jangka pendek dengan memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai di ruang tunggu sekarang untuk dijadikan ruang tunggu sehingga untuk pembangunan jangka pendek hal ini bisa cepat terealisasi dan lebih efektif.

2.	Belum diterapkannya sistem zonasi sehingga masih banyak orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki wilayah yang tidak untuk umum. Seperti pedagang yang berjualan di dermaga, penumpang yang menunggu tidak memanfaatkan ruang tunggu yang telah disediakan, bahkan Penumpang lebih banyak memilih langsung menunggu di kapal. Hal ini dapat membuat dermaga menjadi tidak tertib dan tertata.	Penetapan zona wilayah untuk penumpang harus dilakukan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan, Penyeberangan dan diadakannya sosialisasi dan informasi kepada pengguna jasa dan masyarakat tentang sistem zona wilayah Pelabuhan Penyeberangan Sape. Zona A : Loket Penumpang dan Lapangan Parkir Antar/Jemput Ruang tunggu penumpang Jalur masuk dermaga Zona B : Tollgate dan Jembatan Timbang Amanan Kendaraan Kendaraan Siap muat Zona C : Jalur Keluar Masuk Kapal dan Fasilitas vital
----	--	---

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2021

4. **KESIMPULAN**

- a. Pada kondisi eksisting Pelabuhan Penyeberangan Sape belum memiliki luasan yang cukup dan jumlah kursi ruang tunggu yang memadai, dibutuhkan penambahan luas dan banyaknya kursi ruang tunggu yaitu dari kondisi eksisting luas ruang tunggu yang ada 82 m² menjadi 109 m² untuk kondisi rencana dan untuk kursi ruang tunggu dari kondisi eksisting yaitu 20 unit kursi menjadi 91 unit untuk kondisi rencana.
- b. Belum diterapkannya sistem zona serta belum terdapat papan rambu zona di pelabuhan penyeberangan Sape mengakibatkan belum adanya batasan di area pelabuhan bagi pengguna jasa hal ini dapat dilihat dari terdapatnya orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki area pelabuhan dan daerah terlarang bagi umum, serta pemanfaatan ruang tunggu yang tidak maksimal dan efektif sehingga pelabuhan menjadi kurang tertata. Langkah yang dapat diambil yaitu dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan sehingga dapat mengembalikan fungsi pelabuhan dan menciptakan pelabuhan penyeberangan yang sesuai dengan standar dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun

2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan
Penyeberangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Kementerian Perhubungan. (2019). *Peraturan Nomor 66 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan*. Jakarta: Menteri Perhubungan.
- Indonesia. Kementerian Perhubungan. (2017). *Peraturan Nomor 103 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan*. Jakarta: Menteri Perhubungan.
- Indonesia. Kementerian Perhubungan. (2016). *Peraturan Nomor 29 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan*. Jakarta: Menteri Perhubungan.
- Indonesia. Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Nomor 13 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Menteri Perhubungan.
- Indonesia. Kementerian Perhubungan. (2004). *Keputusan Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan*. Jakarta: Menteri Perhubungan.
- Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2010). *Peraturan Nomor SK.242/HK.104 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan*. Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Indonesia. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. (1998). *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Iskandar Abu Bakar, dkk.